

EKSISTENSI POLITIK IDENTITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 DI KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA

Humardani Sadar Alam

NPP. 31.0992

Asdaf Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: humardani15@gmail.com

Dosen Pembimbing: Dr. Heru Rochmansjah, S.H, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Identity politics that occurs in Ternate City due to religious and identity issues that are often associated with politics and government, overseeing one identity for the reason of dominating an area with an identity owned by an individual or interest group by local elites and political parties. The problems that arise from the use of identity are feared to lead to various conflicts and election violations that often occur which are rooted in the practice of identity politics, because these practices lead to potential election violations such as civil servant neutrality, sara politicization and money politics that occur in the community. **Purpose:** This study aims to determine the existence of identity politics, the factors that cause and the impact arising from this practice in organizing simultaneous regional elections in 2020 in the city of ternate. **Method:** This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. **Result:** The existence of identity politics in the Ternate City elections is real, but for the direct influence on the contribution to the electoral side of the election of the candidate pairs involved can be said to be small, but ethnic issues in identity politics that occur still exist. So far, the people of Ternate City have carried out political activities with modern politics. One thing is impossible that political elites and political parties are inevitable to utilize identity politics has many ways and strategies. **Conclusion:** It is expected that in every election from general elections to regional head elections, especially in Ternate City, so as not to cause fanatical attitudes and attitudes towards an identity, ethnic group or to the candidates they support, preventive measures, various prevention efforts are needed from the beginning before and after the implementation of the elections. and also the importance of further political education for the people of Ternate City.

Keywords: Political Existence, Identity Politics, Regional Head Election

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Politik identitas yang terjadi di Kota Ternate karena persoalan agama dan identitas yang sering di kaitkan ke dalam hal politik dan pemerintahan, membawahi satu identitas dengan alasan untuk mendominasi suatu wilayah dengan identitas yang dimiliki suatu individu maupun kelompok kepentingan oleh elit lokal maupun partai politik. Permasalahan yang muncul pemanfaatan identitas ditakutkan menjurus ke berbagai konflik dan pelanggaran pemilu yang sering terjadi yang berakar dari praktik politik identitas, karena praktek tersebut menimbulkan potensi-potensi pelanggaran pemilu seperti netralitas ASN, politisasi sara dan politik uang yang terjadi di lingkungan masyarakat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi politik identitas, faktor penyebab dan dampak yang timbul dari praktik tersebut dalam penyelenggara pilkada serentak pada tahun 2020 di kota ternate. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. **Hasil/Temuan:** Eksistensi politik identitas pada pilkada Kota Ternate tersebut nyata adanya namun untuk pengaruh langsung terhadap sisi kontribusi pada elektoral keterpilihan dari pasangan calon yang terlibat dapat dikatakan kecil namun isu-isu etnis dalam politik identitas yang terjadi tetap ada. Bahwa sejauh ini masyarakat Kota Ternate melaksanakan kegiatan perpolitikan dengan politik modern, Satu hal tidak mungkin bahwa elit politik maupun parpol tidak terelakkan untuk memanfaatkan politik identitas mempunyai banyak cara dan strategi. **Kesimpulan:** Diharapkan dalam setiap penyelenggaraan pemilihan mulai dari pemilihan umum hingga pemilihan kepala daerah terutama di Kota Ternate agar tidak menimbulkan sifat dan sikap fanatik terhadap suatu identitas, kelompok etnis maupun terhadap bakal calon yang didukungnya, Tindakan Secara preventif, diperlukan berbagai upaya pencegahan sedari awal sebelum dan setelah pelaksanaan pilkada. dan juga pentingnya pendidikan politik lanjutan bagi masyarakat Kota Ternate.

Kata Kunci: Eksistensi Politik, Politik Identitas, Pemilihan Kepala daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Euforia perpolitikan saat ini bisa dibilang sebagai kebebasan berdemokrasi hingga tuntutan dalam berpikir kritis dalam menanggapi segala macam isu maupun permasalahan yang terjadi dalam hal apapun, tidak luput juga perihal dengan perkembangan politik. Politik menjadi salah satu sarana pendekatan yang paling mumpuni untuk menjadi ajang perebutan kekuasaan. Demokrasi sebagaimana sistem perpolitikan yang dapat memberi ruang kebebasan dan setara bagi semua rakyat negara. Interpretasi demokrasi cerminan tatanan politik yang terukur dari tingkat rivalitas dan kemungkinan oposisi dalam tatanan politik itu sendiri maupun tingkat keikutsertaan masyarakat (Dahl Robert, 1982).

Teori formalitas politik identitas dari beragam bentuk hasil kajian terdapat bahwa salah dua faktor baku yang menggerakkan etnis dan agama menjadi satu kesatuan yang menjadi alat jitu dalam proses perpolitikan. Pertama, pertemuan etnis dan agama menjadi tolak ukur dalam pertarungan. Kedua, ketika jalannya proses politik yang terjadi selalu saling berkompetitif. Bermaksud bahwa proses politik ini menempatkan grup-grup identitas dalam konflik (saling berhadapan) dan seimbang (tidak ada yang menang dan kalah) sehingga tidak didapatkan pihak mana yang akan menang dalam jangka waktu yang belum jelas (Nasrudin, 2019).

Realisasinya sekarang bagaimana para aktor sebagai pelaku giat di, dalamnya dapat menepis isu-isu seperti etnis dan agama sehingga tak menjadi bukti terjadinya pertarungan. Implikasi konflik yang bermunculan berkaitan dengan keberbagaian masyarakat yang mengarah ke arah kepentingan politik tertentu. Konflik tersebut selaras dengan relevansi di Indonesia saat persaingan antar bakal calon dalam suatu pemilihan yang kontinu saling melempar ujaran kebencian dengan kabar mengabar yang tersebar yang didalamnya terdapat isu SARA (Tutukansa, 2022). Hal tersebut terjadi secara insidental merupakan salah satu persoalan politik yang berkorelasi dengan identitas pada masyarakat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kota Ternate yang merupakan salah satu kota bagian dari Provinsi Maluku Utara yang sudah menjadi kota dengan infrastruktur pembangunannya yang cukup pesat. Dengan pesatnya Pembangunan terjadi di Kota Ternate berdampak juga pada mobilitas pada arus migrasi berbagai macam etnis di Kota Ternate, yang terdiri dari etnis Makean, Tidore, Tobelo-Galela, dan etnis pendatang dari luar Maluku Utara, seperti etnis Bugis, Buton, Gorontalo, Jawa, dan sebagainya. Distribusi ini terlihat pada masyarakat adat asli Maluku Utara yang mobilisasinya dilakukan pada sektor pemerintahan, pertanian dan tenaga kerja, Sedangkan etnis imigran Sebagian besar bekerja sektor perdagangan atau korporasi. Sehingga terjadi berbagai berpetakan.

Hal Ini tentu dapat menjadi salah satu target dan kesempatan bagi para elit politik lokal untuk melakukan strategi dalam pemenangan pasangan yang mereka usung dengan salah satu strategi yaitu politik identitas. Pandangan para partisipan dan kritikus fokus bahwa pada politik identitas, sebagaimana mestinya politik yang berlandas pada gagasan esensial atau gagasan mutlak identitas. Kritik terhadap politik identitas, bertolak belakang dari pandangan hasil yang menganut esensial sebagai politik yang kaku dan tidak stabil karena munculnya status minoritas yang mirip ras dan etnis sebagai bibit utama dari klaim identitas itu sendiri. (Bernstein, 2002:532).

hingga saat ini masyarakat di Kota Ternate masih menganggap bakal calon kepala daerah yang berasal dari putra daerah, dapat dipercaya, mampu mengedepankan aspirasi hingga pokok permasalahan yang terjadi di daerah tersebut. Jarak hubungan antara masyarakat dengan kepala daerah lebih dekat dan akrab, Praktek politik ini membuat para kandidat/bakal calon untuk mewujudkan kepentingnya melalui kesamaan identitasnya. Isu politik identitas di Kota Ternate telah mewarnai kehidupan berdemokrasi di pesta demokrasi, dimana pilkada yang mampu mengimplementasikan suasana demokratis yang di dalamnya terdapat hak semua orang untuk mampu berpartisipasi dan menang dalam gelaran pemilihan tersebut hampir dibidang tidak terwujudkan secara tampak.

Pola pikir masyarakat Kota Ternate hanya berpatokan pada kesamaan etnis, jika ingin mendapatkan suara dan dukungan dari Masyarakat. Terlebih lagi ditakutkan terjadinya berbagai konflik dan pelanggaran pemilu yang sering terjadi yang berakar dari praktik politik identitas, karena praktek tersebut menimbulkan potensi-potensi pelanggaran pemilu seperti netralitas asn, politisasi sara dan politik uang yang terjadi di lingkungan masyarakat. Karena kita ketahui bahwa Kota Ternate sesuai dengan rilis data Indeks Kerawanan Pemilu pada Februari 2020, menempati posisi ketiga tertinggi aspek kerawanan dalam dimensi kontestasi, Dimensi kontestasi selain menempatkan praktek politik uang sebagai indikator, juga mengurai potensi konflik antar pendukung dan konflik antar peserta. Konflik seperti ini rawan terjadi manakala terbukanya praktek politisasi SARA yang melibatkan elit politik dan warga masyarakat yang ikut terseret pada arus politisasi tersebut.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu dalam konteks politik identitas: Pertama, penelitian Fakhrunissa & Alma Nabila Yusuf pada tahun 2022 dengan judul Politik Identitas Dalam Pemilihan Gubernur Maluku Utara Tahun 2019 menemukan bahwa Politik identitas yang terjadi di kontestasi demokrasi yang terjadi Maluku Utara tahun 2019 secara dominan karena dilakukan secara sengaja atas dasar memperkuat kelompok nasionalis dalam hal menarik dukungan politik atau Masyarakat karena dijalankan oleh organisasi informal dan struktur partai utama, pemerintahan, serta struktur birokrasi pemerintah. (Fakhrunissa & Yusuf, 2022).

Kedua, Penelitian Sahrul Pora, dkk pada tahun 2021 dengan judul Menangkal Politik Identitas: Analisis Kemenangan HT-Zadi pada Pemilihan Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015 membahas terpilihnya pemenang Pemilihan Bupati Kepulauan Sula yaitu Hendrata Thes dan Zulfahri Abdullah yang mengkonsolidasi politik identitas dengan berbagai strategis mulai dari membentuk tim yang solid dan kuat di setiap desa, *door to door* dan kampanye melalui media sosial. Namun mobilisasi yang terjadi berjalan secara masif maka untuk menangkalnya dengan menyakinkan para pemilih dengan program-program unggulan HT-Zadi baik di bidang ekonomi, Pendidikan, Kesehatan dan lain sebagainya. (Pora et al., 2021)

Ketiga, penelitian M.Sanopara pada tahun 2023 dengan judul Analisis Kemenangan Politik Identitas Dalam Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020 Di Kota Jambi menemukan bahwa masih terdapatnya politik identitas itu tidak bagus di dalam demokrasi yang dapat menggiring opini dan memecah belahkan antara satu dengan lainnya yang dilakukan oleh elit politik dan masyarakat. Terdapat sekitar 900 anggota Paguyuban Wisnu Murti yang menggunakan politik identitas pada saat pemilihan Gubernur Jambi 2020 di Kota Jambi. (Sanopara, M. 2023).

Keempat, penelitian Yoggi Alvi Hamdani pada tahun 2021 dengan judul Politik Identitas Masyarakat Multietnis Kota Sawahlunto Dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018 menemukan bahwa kesamaan etnis dari pasangan calon Ismed dan Ali Yusuf dengan masyarakat Tanah Lapang tidak sertamerta menimbulkan konstelasi politik identitas dari kelompok masyarakat. Pada penyelenggaraan Pilkada Walikota Sawahlunto 2018 para pasangan calon menjunjung tinggi politik modern, isu etnis yang muncul dalam masyarakat merupakan gerakan etnis yang tidak berpola. Oleh karena itu, tidak ditemukan Gerakan masyarakat yang didasari oleh mobilisasi dari elit politik yang menggunakan isu budaya, karena hal tersebut kelompok masyarakat Tangsi sudah lama menghilangkan sifat primor mereka. (Hamdani, 2022)

Terakhir, penelitian Khairunnisah Lubis, dkk pada tahun 2022 dengan judul Etnisitas Situasional Dalam Pembentukan Identitas Politik Terhadap Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2020 Menemukan bahwa pada setiap penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Simalungun 2020 polarisasi politik identitas menjadi hal yang lumrah terjadi karena fakta dilapangan pemilih memilih kandidat berdasarkan suku, agama dan ras, di setiap kemenangan pilkada selalu saja berasal dari suku Simalungun dengan agama dan ras yang dominan di setiap Pilkada sejak tahun 2005. Karena hal tersebut terjadi bahwa pemasangan calon bupati dan wakil bupati menjadi hal etnisitas situasional yang sering terjadi menjadi sebab dari polarisasi politik identitas tersebut. (Lubis et al., 2021)

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum diteliti oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan adalah Eksistensi Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak di kota Ternate tahun 2020. Dengan

menggunakan Teori Politik Identitas oleh Pierre Van Den Bergh dalam (Mayssara, 2014:22) terdiri dari tiga dimensi penelitian yaitu primordialisme, konstruksionis, dan instrumentalis. Dari beberapa dimensi tersebut eksistensi politik identitas menimbulkan indikator-indikator dalam penelitian, penjelasannya yaitu : Dimensi Primordialis (Etnis, Ras dan Agama sebagai identitas), Dimensi Konstruksionis memuat indikator momentum politik dan isu politik identitas, dan Dimensi Instrumentalis memuat indikator manipulasi mobilisasi dan solidaritas politik (Alat Memenangkan Suara). Karena hal tersebut yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dari Fakhrunissa & Alma Nabila Yusuf, M. Sanopara, Sahrul Pora, dkk, Yoggi Alvi Hamdani, dan juga Khairunnisah Lubis, dkk

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui eksistensi politik identitas yang timbul, faktor penyebab politik identitas, dan menganalisis dampak positif dan negatif dari eksistensi politik identitas yang muncul akibat penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 di kota ternate.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif yakni mengumpulkan dan menyimpulkan data beserta fakta dari realitas yang ada dengan memanfaatkan kejadian yang telah terjadi dan juga informasi yang bersifat nyata. Nazir (2011:174) menjelaskan bahwa pengumpulan data sebagai patokan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

Bogdan dalam Sugiyono (2013:332) menjelaskan bahwa “analisis data adalah proses menemukan dan Menyusun data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya untuk memudahkan pemahaman dan berbagi hasilnya dengan orang lain”.

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dengan panduan wawancara berupa garis besar hal-hal yang akan ditanyakan agar pokok-pokok yang direncanakan untuk mendapatkan data dapat tercakup semua dengan 5 (lima) orang informan baik dari Kepala Badan dan juga jajaran Kepala Bidang Kesbangpol Kota Ternate maupun Tokoh masyarakat dan masyarakat di Kot Ternate. Sedangkan teknik observasi yang dilakukan adalah observasi tidak terstruktur supaya dapat mengembangkan pengamatan di lokasi penelitian tanpa terpaku pada pedoman atau instrumen khusus tertentu. Adapun teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan simpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis eksistensi politik identitas dalam pemilihan kepala daerah serentak Kota Ternate dengan menggunakan Teori Politik Identitas oleh Pierre Van Den Bergh dalam (Mayssara, 2014:22) terdiri dari tiga sudut pandangan /perspektif dalam mengamati/mengkaji politik identitas dalam pemilihan kepala daerah di kota ternate, di antaranya primordialisme, konstruksionis, dan instrumentalis. Dari beberapa dimensi tersebut eksistensi politik identitas menimbulkan indikator-indikator dalam penelitian, penjelasannya yaitu: Dimensi Primordialis (Etnis, Ras dan Agama sebagai identitas), Dimensi Konstruksionis memuat indikator momentum politik dan isu politik identitas, dan Dimensi Instrumentalis memuat indikator manipulasi mobilisasi dan solidaritas politik (Alat Memenangkan Suara). Hasil analisis dan pembahasan ini juga bersumber Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut :

3.1. Eksistensi Etnis, Ras, dan Agama Sebagai Identitas (Primordialisme)

Berkaitan dengan narasi dari Titik Widayanti (Fachrudin, 2021) perspektif Primordialisme, terdapat fenomena agama yang terjadi karena adanya kelompok sosial yang terbentuk berasal dari bentuk wilayah, agama, kebudayaan, bahasa, serta paguyuban (organisasi sosial). Secara tidak langsung, hal ini berkaitan langsung dengan agama sebagai identitas yang merupakan hasil proses kompleks dimana batas-batas simbolik dikonstruksi dan terus dikonstruksi melalui pemanfaatan mitos-mitos yang merupakan kalkulasi sejarah terhadap kepentingan elit politik.

Di Kota Ternate, jika menilik berdasarkan jumlah terbanyak etnis yang tersebar di seluruh wilayah Kota Ternate dapat dijelaskan bahwa etnis terbanyak dimulai dari Etnis Ternate itu sendiri di angka 37,8%, disusul Etnis Makean angka 10,24%, Etnis Tobelo-Galela 8,51%, Etnis Jawa 3,12%, Bugis 1,01% dan Etnis lainnya 30,56% (Sumber : Sekretariat Daerah Kota Ternate, Tahun 2020). Bahwa dari Jumlah etnis tersebut penyebaran di berbagai wilayah di Kota Ternate dengan skala kecamatan yang ada, dapat dijelaskan pada Tabel 3.1 dibawah:

Tabel 3.1 Data Dominasi Etnis berdasarkan persebaran di berbagai kecamatan di Kota Ternate

Kecamatan	Dominasi Suku
Ternate Utara	Ternate
Ternate Tengah	Ternate
Ternate Selatan	Makean dan Tidore
Ternate Barat	Ternate dan Sanana
Pulau Ternate	Ternate dan Tidore
Pulau Moti	Tidore dan Makean
Pulau Hiri	Ternate
Pulau Batang Dua	Wayoli, sanger dan Tobelo-Galela

Sumber : Data diolah peneliti Tahun 2024

Jika melihat dari sisi agama, notabene masyarakat Kota Ternate mayoritas beragama Islam karena dari jaman dahulu Kota Ternate dikenal sebagai pendiri Kesultanan/Kerajaan Islam di Indonesia. Data penduduk Kota Ternate berdasarkan agama terdiri dari: Islam (207 151 Orang), Protestan (6 357 Orang), Katolik (718 Orang), Hindu (54 Orang), Buddha (120 Orang) dan Konghucu (128 Orang) (Sumber : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, 2023).

Jika di bahas terlalu jauh, bahwa dimensi primordialisme ini dapat menjurus ke dimensi Instrumentalisme karena didalamnya menjelaskan bahwa identitas yang ada di konstruksikan untuk proses instrumentalisme untuk tujuannya dimanfaatkan sebagai alat untuk manipulasi dan mobilisasi sosial sebagai alat kekuasaan oleh elit politik.

3.2. Politik Identitas Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Ternate (Konstruksionis dan Instrumentalis)

1. Munculnya Isu Politik Identitas dalam Pemilihan

Sebagaimana data rilis Indeks Kerawanan Pemilu yang dirilis pada Februari 2020, Kota Ternate menempati posisi ketiga tertinggi aspek kerawanan dalam dimensi kontestasi. Dimensi kontestasi selain menempatkan praktek politik uang sebagai

indikator, juga mengurai potensi konflik antar pendukung dan konflik antar peserta. Konflik seperti ini rawan terjadi manakala terbukanya praktek Politik Identitas yang melibatkan elit politik dan warga masyarakat yang ikut terseret pada arus politisasi.

Gambar 3.2

Pernyataan Dalam Bentuk Postingan Grup oleh SWARTA, 2020



Sumber : Facebook Group SWARTA, 2020

Pada Gambar Screenshot 3.2 diatas dapat dilihat postingan grup facebook grup SWARTA merupakan salah satu bentuk upaya dibangunnya opini yang menjurus ke unsur primordialisme dengan membawa sosok figure putra asli daerah dan menerangkan bahwa pentingnya menguasai jumlah suara di masyarakat dengan menggiring identitas putra asli daerah hingga perilaku tim sukses selalu menggunakan segala bentuk monoton seperti penggunaan Bahasa daerah, pakaian serta simbol budaya lainnya, hal ini sebagai bentuk untuk menarik perhatian masyarakat serta penggiringan opini sehingga kemungkinan besar masyarakat dapat tertarik dengan isu seperti ini untuk memobilisasi suara pendukung selaras dengan yang diinginkan oleh elit politik yang bersangkutan. Isu yang muncul dan dibangun dalam pembentukan fenomena politik identitas pada saat penyelenggaraan Pilkada Serentak Kota Ternate tidak dapat terelakkan karena setiap penyelenggara pemilihan presiden, legislatif maupun kepala daerah pasti muncul isu tersebut karena pasangan calon secara sengaja maupun tidak sengaja membawahi setiap identitas yang dimilikinya dan itu juga dilakukan oleh parpol maupun tim sukses pemenang pasangan calon dalam mengumpulkan jumlah suara dan dukungan masyarakat. Situasi ini terciptanya dorongan kepada setiap politisi untuk bertekad membangun pendekatan yang dominan dalam suatu identitas di masyarakat untuk mencapai targetnya.

2. Politik Identitas Menjadi Alat Dalam Memperoleh Suara (Momentum Politik)

Momentum politik di Kota Ternate terutama yang terjadi pada arena politik yang terus menerus menampilkan banyak pertunjukan yang acapkali merepresentasikan sebagai panggung pemain sandiwara yang melahirkan kemungkinan apa yang sering disebut dengan manipulasi identitas dan etnik situasional. Bagaimana perilaku tersebut selaras dengan keterwakilan pasangan calon yang maju dalam pilkada tahun 2020, bukan hanya soal pemilih yang beragam, tetapi juga pasangan calonnya pun berasal dari berbagai latar belakang yang beragam juga, perwakilan dari masing-masing etnis pun tidak dapat terelakkan yang berada di Kota Ternate. Pasangan calon Merlisa - Juhdi Taslim yang merupakan perwakilan dari etnis Makean dan Tidore, kemudian Pasangan

calon Tauhid Soleman - Jasri Usman yang merupakan perwakilan dari etnis Ternate dan Togale (Tobelo-Galela), hingga Pasangan calon Muhammad Hasan Bay - Mohammad Asghar Saleh yang merupakan perwakilan dari etnis Tidore dan Ternate, dan begitu pun dengan Pasangan calon Mohammad Yamin Tawary - Hi. Abdullah Taher yang merupakan dari etnis Makean dan Ternate.

Politik identitas pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 tersebut nyata adanya namun untuk pengaruh langsung terhadap sisi kontribusi pada elektoral keterpilihan dari pasangan calon yang terlibat dapat dikatakan kecil namun politik identitas yang terjadi tetap ada. Bagaimana wujud praktik politik identitas yang terjadi pada pilkada 2020 kemarin bentuk yang terjadi secara kasat mata atau tidak terlihat secara langsung yang dirasakan oleh orang lain yang tidak terlibat dalam praktik tersebut dan tanpa disadari Masyarakat maupun kelompok etnis kepentingan tersebut melakukan praktik politik identitas secara tidak sengaja.

3. Politik Identitas Dalam Memobilisasi Dukungan Untuk Pasangan Calon (Manipulasi dan Mobilisasi Pendukung)

Pendekatan instrumentalis yang terjadi di pilkada Kota Ternate sebagai salah satu instrumen kekuatan besar dalam memobilisasi dukungan Masyarakat untuk menguasai kekuasaan. Tak terkecuali yang terjadi di Kota Ternate yang mayoritas masyarakatnya adalah suku ternate, Tidore, Makean, dan Tobelo-Galela, karena etnis besar tersebut tidak dapat dihindari bakal terjadinya pemanfaatan etnis oleh elit politik maupun elit lokal, sehingga etnis dimanfaatkan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui Masyarakat yang primitif atau masih tradisional dan memegang teguh karakteristik yang dimilikinya.

Pemilihan Kepala Daerah Kota Ternate tahun 2020 sering ditemukan aksi dari tim pemenangan pasangan calon masih terjadinya praktik politik kultural yang didalamnya memuat pemanfaatan identitas suatu etnis di kelompok Masyarakat dan itu selaraskan dengan identitas yang dimiliki oleh pasangan calon tujuannya untuk memperoleh dukungan dan menguasai jumlah suara yang ada di suatu wilayah Masyarakat tersebut sesuai dengan syarat berjalan pendekatan instrumentalisme. Sehingga politik identitas yang timbul sudah menjadi hal lumrah di masyarakat karena dilakukan secara intens dalam bentuk simbolik untuk memobilisasi dukungan masa. Dibalik hal tersebut juga terdapat juga unsur *money politic* atau politik uang yang timbul beriringan dengan politik kultural walaupun itu hanya dalam bentuk sumbangan, ini juga menjadi temuan penting bukan hanya etnis kultural yang meruak melainkan juga ada praktik pendukung yaitu *money politic* dalam memobilisasi massa pendukung.

4. Etnis sebagai Alat Memenangkan Kampanye (Solidaritas Politik)

Bangkitnya politik identitas dapat diartikan lainnya sebagai mekanisme Masyarakat dalam beradaptasi menghadapi tingginya keambiguan era demokratisasi yang telah merubah kompetisi memberdayakan berbagai sumber daya antara ekonomi dan politik menjadi lebih keras. Yang terjadi pada demokrasi baru akhir-akhir ini, kerap kali para elit kelompoklah yang memanipulasi pasang-surut identitas kelompoknya. Para elit politik ini mengeksploitasi asal-usul komunitas dan simbol-simbol kulturasi untuk memobilisasi dukungan politik (Negeri et al., 2016).

Politik identitas yang merujuk dari *base on identity* (identitas) dan *base on interest* (kelompok kepentingan) dijadikan sebagai alat untuk merebut simpati publik. Lebih lanjut, perkembangan politik identitas saat ini telah melihat pergeseran makna identitas

yang sebenarnya, karena identitas tidak digunakan untuk mengidentifikasi atau mencirikan diri individu melainkan karena kepentingan kelas politik, ini menjadi Pelajaran dan evaluasi pada ajang pemilihan kepala daerah Kota Ternate tahun 2020.

Penggunaan isu etnis yang terjadi dalam pilkada kota ternate 2020, bagaimana isu tersebut digunakan untuk menilai tampilan awal masyarakat terhadap kandidat yang bakal didukungnya. Untuk nilai besarnya, tolak ukur seorang calon kepala daerah tentunya dilihat dari ketokohan maupun tingkat elektualnya dalam pemerintahan. masyarakat melihat kesamaan identitas dari setiap pasangan calon sebagai tolak ukur keberpihakan masyarakat dan namanya politik pasti juga sebuah identitas yang menonjol. Karena politik dan identitas tidak dapat dipisahkan tetapi menggunakan politik identitas untuk kepentingan tertentu, yang dilarang dilakukan seperti contohnya untuk kepentingan memecah belah, dan politisasi SARA.

3.3. Faktor Penyebab Politik Identitas pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Ternate

Selaras dengan landasan pada teori dari Pierre Van Den Bergh didalam menyebutkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya politik identitas mulai dari konstruksionis maupun instrumentalisme. Sebagian besar munculnya politik identitas dalam berbagai penyelenggara pemilihan mulai dari pemilihan umum hingga pemilihan kepala desa sekalipun, politik identitas muncul yang paling menonjol karena adanya unsur instrumentalisme terutama yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Ternate tahun 2020 bagian tim sukses atau istilahnya kelompok-kelompok pemenangan pasangan calon kandidat kepala daerah masih memanfaatkan adanya identitas yang dimiliki oleh pasangan calon sebagai senjata lainnya untuk memberdayakan dukungan dan suara Masyarakat sebagai haknya pemilih dengan pendekatan instrumentalisme sesuai dengan situasi di lingkungan Masyarakat.

Faktor penyebab terbangunannya politik identitas pada pilkada ternate 2020, fakta yang terjadi sebagaimana fakta terjadi bahwa politik identitas yang terjadi tetap ada seperti halnya yang terjadi di daerah lain, namun ditekankan kembali praktik politik di Kota Ternate cenderung ke arah politik modern. Rata-rata kejadian selama pilkada ternate kecenderungan seluruh paguyuban itu melihat dari figur dan ketokohan yang dimana orang-orang yang berdomisili di Kota Ternate terutama orang-orang pendatang luar Maluku Utara Sebagian besar masyarakat tersebut yaitu kalangan pengusaha dan wirausaha, karena berkaitan dengan pekerjaannya mereka tersebut mereka lebih mementingkan visi misi calon kepala daerah yang bisa mensejahterakan dan memberi rasa aman terhadap usaha mereka. Bagaimana kepala daerah yang mempunyai pengalaman pemerintahan yang baik, kedua dia mempunyai intelektual yang cukup mumpuni karena semua itu relatif.

3.4. Dampak Politik Identitas pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Ternate

Melihat jauh dari peran suatu politik identitas di pilkada Kota Ternate maka tentunya memiliki berbagai dampak di munculkan baik itu dampak positif maupun dampak negatif dalam suatu internal kelompok etnis maupun eksternal etnis, pengaruh dari politik identitas mungkin saja sangat berpengaruh besar kepada masyarakat Kota Ternate yang multi etnis. Jika suatu identitas yang ada dimasyarakat yang menjurus ke arah kepentingan, peneliti mengamati bahwa kepentingan dalam politik identitas yaitu kepentingan politis yang dilakukan elit politik maupun elit lokal yang menjadi tim sukses pemenangan dari salah satu pasangan calon yang terlibat.

bahwa dampak yang ditimbulkan dari politik identitas terhadap masyarakat Kota Ternate seperti halnya yang terjadi daerah lainnya jika dilihat dari sudut pandang sempit, masyarakat menilai dengan pandangan pertama kepada calon kepala daerah yang berasal

dari etnis yang jelas dan mempunyai pengetahuan tentang budaya di masyarakat yang luas karena memiliki kesamaan budaya calon kepala daerah yang nantinya menjadi pemimpin mudahnya dalam melakukan pendekatan secara emosional dan mampu memahami kemauan masyarakatnya. Jika dilihat secara sudut pandang luas bahwa dampak politik identitas menjurus pada isu yang mengarah kepada kelompok-kelompok etnis tertentu dan berpotensi terjadi politisasi SARA yang mengarah kepada konflik di masyarakat.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Eksistensi politik identitas yang menyeruak pada pilkada Kota Ternate tahun 2020 yang menimbulkan berbagai dampak maupun isu-isu yang timbul. Penyelenggaraan pilkada yang terjadi, bahwasannya masyarakat di Kota Ternate rata-rata untuk pemahaman politiknya dapat dikatakan cukup mumpuni. Perpolitikan yang terjadi tentunya menjurus ke politik modern yang dimana politik modern tersebut memuat pertarungan antar kandidat calon kepala daerah yang memiliki *track record* dan pengalaman yang berbeda-beda hingga bersaing dengan ketat tentunya dengan cara yang sportif bukan hanya mengandalkan identitas etnis maupun agama yang di anutnya. Masyarakat Kota Ternate yang terbuka untuk semua orang, dengan berpolitik santun tentunya praktik politik identitas maupun politik ke arah ekstrim seperti halnya politisasi sara tentunya terhindari.

Dapat dikatakan politik identitas itu tetap selalu ada di dalam pergelaran politik di setiap daerah pun juga sama pastinya politik identitas itu tetap menyeruak. Untuk kasus yang terjadi Kota Ternate dibidang nihil akan laporan maupun berita yang memuat praktik politik identitas secara besar besaran, karena dari Bawaslu maupun Kesbangpol Kota Ternate telah melaksanakan tindakan pencegahan mulai dari masa persiapan tahapan pemilihan. Tindakan pencegahan berupa pemetaan terhadap kerawanan politisasi SARA maupun pelanggaran lainnya, menggelar rapat koordinasi dengan para pihak yang berkompeten dalam pemetaan kerawanan maupun dukungan pengawasan, dan gencarnya sosialisasi secara langsung kepada stakeholder, tokoh masyarakat dan masyarakat.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu berpedomann pada Teori Politik Identitas oleh Pierre Van Den Berghe dengan memuat isi tentang isu menyeruaknya Politik Identitas yang muncul di setiap daerah khususnya pada momen pilkada serentak selalu saja muncul dengan peristiwa dan pergerakan politik yang sama persis dengan daerah lainnya. Mobilisasi politik dengan memperdayakan identitas dari salah satu etnis dan agama maupun kelompok paguyuban yang ada oleh elit lokal hingga partai politik. Perbedaan dari penelitian yang lainnya, bagaimana pengelolaan isu etnis maupun agama yang terjadi pada pilkada 2020 di Kota Ternate dapat dikatakan menjadi hal lumrah dan itu sering terjadi namun pemanfaatan identitas tersebut dapat menimbulkan ke hal positif. Misalnya, keberagaman yang ada dapat membuat kerukunan antar masyarakat menjadi erat. Tentunya, isu yang menyeruak tersebut tidak sampai menimbulkan gerakan politisasi SARA maupun konflik antar masyarakat yang hingga diberitakan di media koran maupun media massa lainnya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Adanya isu hingga terjadi praktik politik identitas yang terjadi di pemilihan kepala daerah kota ternate tahun 2020 yaitu bagaimana politik identitas ada dimana-dimana pastinya setiap perhelatan dalam kegiatan pemilu. Sebetulnya praktik politik identitas yang terjadi di Kota Ternate ditakutkan menjurus ke arah

politisasi SARA, Maka daripada itu untuk temuan kasus politik identitas nihil kasusnya pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 lalu tersebut. Sebetulnya SARA di Kota Ternate mendominasi, namun kaitannya dengan isu agama sangatlah kecil kemungkinan pengaruhnya karena Kota Ternate di dominasi agama islam itu sendiri dan karena pengaruh terbesarnya adalah suku dan kelompok etnis di suatu wilayah tersebut.

2. Faktor penyebab terbentuknya praktik politik identitas yaitu banyaknya tuntutan yang terjadi dimulai tuntutan untuk merealisasikan visi-misi dan program, tuntutan dari masyarakat untuk mempunyai kepala daerah yang berasal dari putra daerah hingga tuntutan dari tim sukses yang menuntut mendapat jabatan, pekerjaan proyek lain dan sebagainya.
3. Pandangan masyarakat tentang konflik yang terjadi di Maluku Utara selalu berkaca pada Kota Ternate apalagi kota Ternate ini dibidang kecil namun faktanya kota ternate minim konflik apalagi yang berkaitan dengan konflik politik identitas dalam pemilu. Oleh karena itu, dampak dari kegiatan politik yang terjadi terutama politik identitas selalu berdampak pada angka gejala politik yang ada di Kota Ternate dan itu dibuktikan pada indeks kerawanan pemilu di Maluku Utara yang berkiblat utama pada siklus perpolitikan Kota Ternate yang dimana fakta dilapangan minimnya praktik politik identitas sebagai pelaku utama yang dipublikasikan di berbagai media massa, namun dapat dikatakan politik identitas dapat menjurus ke arah politisasi sara maupun kegiatan pemicu politik praktis.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada lingkup Kota Ternate dan juga keterbatasan media pemberitaan maupun laporan-laporan yang berkaitan dengan kasus yang diteliti.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian sehingga penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Eksistensi Politik Identitas pada Pilkada Kota Ternate untuk menemukan hasil yang lebih mendalam dan juga terpadu.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ternate beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta pihak yang membantu dan menyelesaikan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Achmad Fachrudin (2021). Konflik Politik Identitas: Pergumulan Politik, Agama dan Media Dari Pilkada DKI 2017 Hingga Pilpres 2019.(n.p.): Literasi Demokrasi Indonesia (Literasindo).

Bergh, Pierre Van Den. 1991. Ethnicity and Nationalism: Theory and Comparison. New Delhi: Sage Publication. hlm. 299

Bernstein, M. (2002). Identities and Politics. Social Science History, 26(3), 531–581. <https://doi.org/10.1017/s0145553200013080>

Dahl, R. A. (1982). “Dilema demokrasi pluralis: antara otonomi dan kontrol”.

Facebook Grup SUARA WARGA TERNATE (SWARTA), 2020

Fakhrunnisa, F., & Yusuf, A. N. (2022). Politik Identitas Dalam Pemilihan Gubernur Maluku Utara Tahun 2019. *Journal of Citizenship*, 1(1), 27–33. <https://doi.org/10.37950/joc.v1i1.225>

Hamdani, Y. A. (2022). Politik Identitas Masyarakat Multietnis Kota Sawahlunto Dalam Pilkada Walikota Dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 2(1), 16–30. <https://doi.org/10.25077/jdpl.2.1.16-30.2020>

Lubis, K., Simamora, B., & Mulka, S. R. (2021). ETNISITAS SITUASIONAL DALAM PEMBENTUKAN IDENTITAS POLITIK TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2020 Khairunnisah. *Ilmiah Sosiologi Agama*, 4(2), 69–79.

Nasrudin, J. (2019). Politik Identitas dan Representasi Politik. 1, 34–47. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Negeri, I., Uin, (, Hidayatullah, S., Untuk, J.), Persyaratan, M., Gelar, M., Sosial, S., Sos, S., & Zharfandy, I. (2016). *PENGARUH POLITIK IDENTITAS TERHADAP PEMILIHAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2013 Skripsi ini diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas*.

Pora, S., Qodir, Z., & Purwaningsih, T. (2021). Menangkal Politik Identitas: Analisis Kemenangan HT-Zadi pada Pemilihan Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015. *JIIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 18–34. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.8965>

Sanopra, M (2023) Analisis Kemenangan Politik Identitas dalam Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020 di Kota Jambi. S1 thesis, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tutukansa, A. F. (2022). Maraknya Pengaruh Kompleks Politik Identitas Di Indonesia. *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, 14(1). <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol14.iss1.art3>